



Pemkab Tindaklanjuti Rekomendasi BPK

SINTANG, TRIBUN-Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Kalimantan Barat menyerahkan laporan hasil pemantauan tindak lanjut, rekomendasi hasil pemeriksaan dan laporan hasil pemantauan kerugian Negara/Daerah Semester I 2015 kepada Pemkab Sintang, Kamis (17/9).

Penjabat Bupati Sintang Alexius Akim menekankan komitmen dalam pertanggung jawaban setiap penggunaan anggaran. Pihaknya berjanji akan menindak lanjut hasil rekomendasi dari BPK RI tersebut.

"Apapun yang kita lakukan dan setiap rupiah uang yang kita keluarkan, memang wajib kita pertanggungjawabkan. Setelah menerima hasil rekomendasi BPK ini, semua harus bergerak menyelesaikan hasil rekomendasi tersebut. Apa saja yang kurang dari pemkab yang menjadi penyebab lemahnya tindaklanjut rekomendasi harus diperkuat," tegasnya.

Dia mendesak semua rekomendasi harus ditindaklanjuti dengan baik. Karena rekomendasi yang tidak ditindaklanjuti oleh Pemda akan menjadi kerugian negara.

Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan

Barat yang diwakili oleh Patrice Lumumba Sihombing selaku Kepala Sub Auditorat menegaskan bahwa setiap pemkab harus menindaklanjuti hasil temuan sesuai dengan rekomendasi yang sudah diberikan.

"Kami menyarankan pemkab untuk komit dan proaktif melakukan monitoring terhadap tindaklanjut yang dilakukan, SKPD harus meningkatkan peran serta dalam penyelesaian rekomendasi dan kerugian daerah. Untuk rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti harus didukung dengan alasan yang sah dan didukung alasan yang kuat," saran Patrice.

Ketua DPRD Sintang Jefray Edward menyampaikan rasa terima kasihnya kepada BPK RI Perwakilan Kalbar yang sudah memberikan rekomendasi, saran dan masukan kepada Pemkab Sintang dalam rangka meningkatkan kinerjanya.

"Kami terus mengawasi kinerja Pemkab Sintang dalam meningkatkan kinerjanya serta mendorong agar menindaklanjuti hasil rekomendasi BPK RI. Saya berharap 60 hari ke depan, rekomendasi yang sudah diberikan oleh BPK RI agar kembali bisa diserahkan kepada BPK RI untuk menghindari sanksi," ujarnya. (*/zul)